

Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan DPS Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Yang Ada Di Indonesia Tahun 2016 – 2018*

Olivia Oktafiana

Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
oliviaoktafiana25@gmail.com

Merina Ditya Paramitha

Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
merinadityap@gmail.com

Sri Wahyuni

Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Dps Terhadap *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016 – 2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 perbankan syariah. Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Keuangan per tahun perbankan syariah tahun 2016-2018. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji statistik t, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan (uji F) berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR. Sedangkan Dewan Komisaris mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap CSR.

Kata Kunci : Dewan Komisaris, Komisaris independen , DPS , *Corporate Social, Responsibility (CSR)*, *islamic social reporting (ISR)* .

LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi era globalisasi seperti ini, perusahaan dituntut untuk mampu bersaing secara sehat dan kompetitif agar perusahaan lebih unggul dari perusahaan yang lain dan dapat mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan tentunya dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Perkembangan suatu entitas tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial yang ada di sekitar entitas. Dalam berbagai industri, termasuk pada sektor industri perbankan harus menyediakan pertanggung jawaban sosial terhadap lingkungan yang meliputi tiga unsur yaitu unsur ekonomi (keuntungan), sosial (masyarakat), dan lingkungan (planet). Perilaku bank terhadap lingkungan sosial telah memberikan kontribusi dalam perkembangan entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri perbankan adalah termasuk industri yang diwajibkan untuk melakukan praktik tanggung jawab sosial. Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Istilah bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari *banco* menurut bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Kemudian, istilah Bank menurut UU Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi dasar dari bank sendiri adalah

1. Sebagai tempat menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*)
2. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)

Jenis bank di dunia dibedakan menjadi dua, dibedakan berdasarkan sistem yang digunakan, yaitu :

1. Bank berdasarkan sistem konvensional
2. Bank berdasarkan sistem syariah Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang syariah, minuman keras misalnya. Ada beberapa prinsip utama Bank Syariah menurut Arifin (2009) :
 - a. Larangan melakukan riba dalam berbagai bentuk transaksi
 - b. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
 - c. Memberikan zakat kepada yang berhak.

Kedua jenis Bank tersebut memiliki beberapa perbedaan dan persamaan tersendiri. Perbedaan kedua sistem dapat dilihat dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Dari sisi penghimpunan dana kedua sistem perbankan ini bertujuan untuk pergerakan dana seluruh masyarakat. Namun, dalam sistem syariah dimaksudkan untuk memobilisasi dana masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional, karena adanya masalah bunga. Kehadiran Bank Syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan alternatif sistem perbankan bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dimana perbankan syariah memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dengan melarang adanya bunga atau biasa disebut dengan Riba dan menggantinya dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Menurut Mallin et al (2014) Perbankan syariah telah tumbuh dengan pesat sejak awal didirikan pada pertengahan 1970. Menurut angka yang dikeluarkan oleh Banker, aset yang dimiliki bank syariah secara global yang diadakan oleh bank konvensional melebihi dari \$ 1,8 triliun pada tahun 2013.

Tujuan utama pengusaha adalah mencari keuntungan sebagaimana salah satu sosial yang melekat pada pengertian perusahaan. Namun, sosial baru menyatakan bahwa tujuan perusahaan yang perlu menjadi perhatian tidak hanya mencari keuntungan, namun yang lebih penting adalah perusahaan yang dijalankan harus berkelanjutan. Oleh karena itu, agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan berjalan secara berkelanjutan maka perlu melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Responsibility Social*) (Isaksson, et al., 2014). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban yang diimplikasikan, didorong, atau dirasakan para manajer, yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka, untuk melayani atau melindungi kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok diluar diri mereka sendiri. Para eksekutif puncak suatu organisasi biasanya menentukan sebuah pendekatan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Menurut (Farook, 2008 dalam Mallin et al, 2014) tentang pandangan ini, bank syariah diharapkan untuk melakukan peran mendistribusikan kekayaan (melalui profit and loss sharing) untuk selektif investasi yang berkontribusi terhadap peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Siregar dan Bachtiar (2010) melakukan penelitian bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Dewan komisaris dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal serupa di temukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Merve Kili dan Cemil Kuzey (2015) ; Fuente et al (2017). Namun hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang di lakukan oleh Carol Tilt (2016) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini serupa dengan penelitian yang di lakukan oleh Giannarakis Grigoris (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ouedraogo (2015) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Komisaris Independen terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini serupa dengan penelitian yang di lakukan oleh Rajangam (2016) ; Fuente et al (2017). Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh McGuinness et al (2017) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Komisaris Independen dengan CSR

Maka judul yang peneliti ambil adalah “Pengaruh Dewan Direksi , Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Dps Terhadap *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016 - 2018”. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi , dewan komisaris, komisaris independen, DPS, dan *corporate social responsibility*.

Rumusan Masalah

Perusahaan keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Islam adalah pengertian dari Industri keuangan syariah. Perusahaan diharapkan dapat menyeimbangkan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial yang menjadi tujuan mereka. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, bank syariah wajib secara sukaerla bertanggung jawab sosial dari pada bank konvensional yang hanya didasarkan pada keuntungan semata. Semakin banyak praktik CSR, maka masyarakat akan semakin

sejahtera, semakin percaya terhadap bank tersebut, dan para investor tentu akan tertarik menanamkan modalnya di bank tersebut. Terdapat rumusan masalah mengenai research gap yaitu perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh : Simpson dan Theodor (2002), Waddock dan Samuel (1997), Menne (2016), Ahmed et al (2012), Soana (2011), Williams dan Donald (2001), Farook et al (2011), Musibah dan Wan Sulaiman (2014), Aribi dan Simon Gao (2010), Siregar dan Bachtiar (2010), Fuente et al (2017), Carol Tilt (2016), Giannarakis Grigoris (2014), Ouedraogo (2015), Rajangam (2016), McGuinness et al (2017) dan Kill dan Cemil Kuzey (2015).

Atas gap yang muncul, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian anatara lain:

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
2. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
3. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi banyak pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris menyangkut yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komisaris Independen, dan Dewan Komisaris pada Perbankan Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan di dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bagi praktisi penyelenggara syariah dapat memahami pentingnya meningkatkan Tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan nilai perusahaan

TELAAH LITERATUR

Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris bersifat independen, mereka tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara objektif, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lainnya. Dilansir pada tahun 2003 menurut FCGI, Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam penerapan tata kelola terutama pada *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris menggambarkan poin dari tata kelola *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk mengawasi manajemen saat mengelola perusahaan, membuktikan pelaksanaan strategi perusahaan, dan mewajibkan terwujudnya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris adalah suatu mekanisme untuk mengawal dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris dalam FCGI meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Mengatasi dan memantau suatu masalah benturan kepentingan anggota dewan direksi anggota dewan komisaris dan manajemen, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Mengawasi pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan, dimana memiliki tugas untuk mengawasi manajer dalam melakukan tugasnya dalam melaporkan laporan keuangan dan untuk menjalankan dan menerapkan standar system *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dengan baik dan benar serta komisaris independen harus dapat bersikap independen, dewan komisaris independen dipilih langsung oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Menurut Rahmawati (2013) mengatakan bahwa, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau pemegang pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut Tiswiyanti (2012) mengatakan bahwa, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis yang mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen, komisaris independen diproksinya dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan definisi dari beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, dikarenakan anggota dewan komisaris independen yang dipilih secara langsung oleh pemegang saham guna untuk bertindak independen dalam mengawasi aktivitas manajer dalam melaporkan keuangan, dengan demikian tindakan manajemen laba dalam perusahaan dapat diminimalisir.

DPS

Pada variabel *Islamic Governance* menyinggung tentang jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan pengawas syariah yang menjabat pada beberapa institusi finansial Islam dapat meningkatkan pengungkapan informasi karena dapat melakukan perbandingan pada pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik (Abdullah et al, 2011 dalam Rizkiningsih, 2012).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu bagian penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 48
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab memberikan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut juga berisi tentang struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:
 - 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.

- 2) Apabila peran komisaris sebagai pengawas dalam hubungan dengan kinerja manajemen, jadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam hubungan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- 3) memiliki konsekuensi atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- 4) Ikut melakukan pengawasan pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- 5) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. 49 Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dijelaskan dalam Peraturan Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 47 antara lain :
 1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
 4. Melakukan survei secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme akumulasi dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas (Untung, 2014: 3). CSR adalah salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009:4). Dalam CSR, perusahaan tidak dimintai pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single 27 bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam perihal keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain aspek financial juga sosial dan lingkungan (Rama, 2014: 96). CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk andil dalam pengembangan ekonomi yang kontinu dengan memperhatikan komitmen sosial perusahaan dan menitikberatkan pada proporsional antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Bassam, dkk., 2006: 272). Prinsip-prinsip CSR yang diatur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum terdiri dari (Untung, 2014: 8-9) :

- a. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap direksi. Tanggung jawab tersebut harus diimbangi untuk kepentingan perusahaan dan dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham perusahaan.
- b. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Prinsip ini menginginkan adanya laporan yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan perubahan-perubahan pengurus, saham, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direksi ataupun dewan komisaris. 28
- c. Kewajaran (*fairness*) Prinsip kewajaran memberikan perlindungan terhadap kepentingan minoritas, khususnya para pemegang saham minoritas untuk mendapat perlakuan yang adil.
- d. Tanggung Jawab (*Responsibility*) Prinsip ini menegaskan kepada pengurus perseroan untuk mematuhi peraturan oleh pengelola perusahaan ataupun stakeholder yang berkesinambungan dengan perusahaan. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, prinsip yang berhubungan kuat dengan pelaksanaan CSR adalah prinsip responsibility, karena prinsip tersebut mengedepankan kepentingan stakeholder.

Islamic Social Reporting (ISR)

Pengungkapan ISR dapat diidentifikasi dengan menggunakan indeks ISR. Sejalan dengan penelitian Putri (2014), indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniffa (2002), Haniffa dan Hudaib (2007) dan Othman et al. (2009). ISR menjadi hal yang sangat penting untuk reputasi dan kinerja lembaga keuangan Islam, karena dengan ISR, institusi

keuangan Islami yang berhasil mengungkapkan nilai ISR mereka akan dianggap sebagai entitas yang dapat diandalkan oleh Muslim, Sri wahyuni (2018)

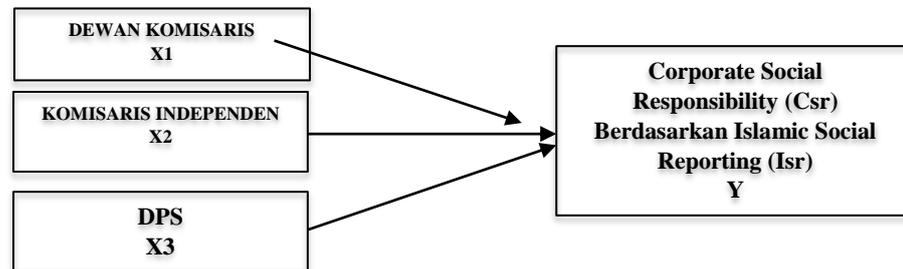
masyarakat dalam menyalurkan dana mereka Peneliti melakukan analisis secara keseluruhan (content analysis) terhadap laporan tahunan masing-masing BUS, analisis ini dengan metode skoring berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) indeks yang terdiri dari 6 tema yaitu tema keuangan, produk, sumber daya manusia, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Tema tersebut dikembangkan menjadi 51 item pernyataan. Metode penilaian (scoring) untuk setiap item tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai 0 untuk setiap item yang tidak diungkapkan
- Nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan

Pengungkapan ISR diberi simbol ISR. Untuk menghitung besarnya indeks ISR yang telah selesai dilakukan pengidentifikasian dengan membagi antara jumlah skor yang dipenuhi dengan jumlah skor maksimum, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{INDEKS ISR} = \frac{\text{total score disclosure yang dipenuhi}}{\text{jumlah skor minimum}}$$

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1** : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah yang ada di Indonesia tahun 2016 – 2018.
- H2** : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah yang ada di Indonesia tahun 2016 – 2018
- H3** : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah yang ada di Indonesia tahun 2016 – 2018

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk merencanakan pengumpulan dan analisa data agar dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder tersebut untuk memenuhi variabel yang diteliti yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan dps terhadap corporate social responsibility pada bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016 -2018.

Sampel

Sampel penelitian sebagai 10 perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016 -2018 sehingga jumlah sampel sebanyak 10 x 3 tahun yaitu 30 sampel.

Alat Analisis

a. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif mendistribusikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

b. Uji Normalitas

Model regresi yang baik menentukan adanya normalitas pada data penelitian. Cara mendeteksi kenormalan data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dikatakan data terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

c. Uji Multikolonieritas

Menurut Santoso (2001:206), pedoman suatu model regresi yang bebas mulikolinearitas adalah: (1). Mempunyai nilai VIF disekitar angka 10. (2). Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Uji autokorelasi Durbin Watson dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode

e. Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase kontribusi yang diberikan oleh variabel ISR, DPS, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen terhadap CSR pada perusahaan Bank Syariah Indonesia.

f. Uji Simultan F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen DPS, Dewan Komisaris, yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai perusahaan).

g. Uji Statistik t

Uji t merupakan pengujian koefisien masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif mendistribusikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil perhitungan statistik deskriptif nampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Deskriptive Statistic

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
ISR	30	.53	.98	.7300	.02353	.12889
DPS	30	2.00	3.00	2.1000	.05571	.30513
DK	30	1.00	3.00	1.6667	.11073	.60648
DKI	30	1.00	6.00	2.6000	.20115	1.10172
Valid N (listwise)	30					

Berdasarkan tabel 1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 30. Pada variabel ISR menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 0,53 dan terbesar adalah 0,98. Rata-rata variabel ISR adalah sebesar 0,73 atau 73% dan standar deviasi sebesar 0,12889.

Pada variabel DPS menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 2,00 dan terbesar adalah 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPS dari perusahaan-perusahaan yang diobservasi menunjukkan nilai terkecil sebesar 2% dan terbesar adalah 3%. Rata-rata DPS dalam penelitian ini adalah sebesar 2,1. Standar deviasi DPS dalam penelitian ini sebesar 0,30513 menunjukkan tingkat variasi pengungkapan variabel DPS.

Pada variabel Dewan Komisaris menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 1,00 dan terbesar adalah 3,00. Rata-rata nilai DK dalam penelitian ini adalah sebesar 1,66. Standar deviasi DK dalam penelitian ini sebesar 0,60648.

Pada variabel Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 1,00 dan terbesar adalah 6,00. Rata-rata nilai DK dalam penelitian ini adalah sebesar 2,60. Standar deviasi DKI dalam penelitian ini sebesar 1,10172.

Uji Normalitas

Model regresi yang baik menentukan adanya normalitas pada data penelitian. Cara mendeteksi kenormalan data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dikatakan data terdistribusi normal (Ghozali, 2013). Hasil uji normalitas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10140541
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.168
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.920
Asymp. Sig. (2-tailed)		.366

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa untuk variabel residual sebesar 0,920 dan *Asymp. Sig.* 0,366 sehingga distribusi pengujian normal.

Uji Multikolonieritas

menurut Santoso (2001:206), pedoman suatu model regresi yang bebas mulikolinearitas adalah: (1). Mempunyai nilai VIF disekitar angka 10. (2). Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Hasil Uji Multikolinieritas nampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	.179	.152		1.171	.252		
DPS	.227	.065	.537	3.481	.002	1.000	1.000
DK	.066	.034	.311	1.969	.060	.957	1.045
DKI	-.013	.018	-.115	-.730	.472	.957	1.045

a. Dependent Variable: ISR

Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel bebas yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang pernah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak dijumpai adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut bisa digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Uji autokorelasi Durbin Watson dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.381	.310	.10710	.605

a. Predictors: (Constant), DKI, DPS, DK

b. Dependent Variable: ISR

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai dw sebesar 0,605. Dengan demikian dapat disimpulkan $DW < 1,338$ sehingga terdapat autokorelasi positif.

Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase kontribusi yang diberikan oleh variabel ISR, DPS, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen terhadap CSR pada perusahaan Bank Syariah Indonesia. Hasil pengujian yang telah dilakukan tampak pada tabel 5:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.381	.310	.10710	.605

- a. Predictors: (Constant), DKI, DPS, DK
- b. Dependent Variable: ISR

Dari tabel di atas diketahui R square (R^2) sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa DPS, ISR, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen mempengaruhi CSR sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar variabel penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien Determinan

Dari tabel di atas diketahui R square (R^2) sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa DPS, ISR, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen mempengaruhi CSR sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar variabel penelitian ini.

Uji Simultan F

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen DPS, Dewan Komisaris, yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Simultan F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.184	3	.061	5.334	.005 ^b
Residual	.298	26	.011		
Total	.482	29			

- a. Dependent Variable: ISR
- b. Predictors: (Constant), DKI, DPS, DK

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $5,334 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang digunakan kurang baik dan blm dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh DPS, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen terhadap CSR

Uji Statistik t

Uji t merupakan pengujian koefisien masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Tolerance	VIF	
(Constant)	.179	.152		1.171	.252			
1	DPS	.227	.065	.537	3.481	.002	1.000	1.000
	DK	.066	.034	.311	1.969	.060	.957	1.045
	DKI	-.013	.018	-.115	-.730	.472	.957	1.045

a. Dependent Variable: ISR

Hasil pengujian terhadap hipotesis – hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai t sebesar 1,969. Nilai sig 0,60 > 0,05, hal ini berarti variabel ukuran Dewan Komisaris tidak signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, ditolak.

2. Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Variabel ukuran Dewan Komisaris Independen memiliki nilai t sebesar -0,730. Nilai sig 0,472 > 0,05, hal ini berarti variabel ukuran Dewan Komisaris Independen tidak signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian

H2 : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, ditolak.

3. Ukuran Dewan Pengawas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Variable ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai t sebesar 3,481. Nilai Sig 0,002 < 0,05, hal ini berarti variabel ukuran DPS signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian,

H3 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Dps Terhadap *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016 – 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Responsibility*.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Responsibility*.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Responsibility*.

Saran

Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas dan periode penelitian pun terbatas hanya 3 tahun, yaitu tahun 2016-2018. Sampel pun terbatas hanya pada bank syariah Indonesia. Jadi bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dengan melakukan pengembangan seperti, menambah jumlah variabel yang mempengaruhi CSR berdasarkan ISR, menambah tahun pengamatan, dan memperluas sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. 2010. “*Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*”. Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Ghaali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Edisi Tujuh Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haniffa, R. 2002. “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. *Indonesian Management Research*, 128-146.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. 2009. “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia*”. *Research Journal of International Studies*.
- Putri, Tria Karina. 2014. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012*.” Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahmawati, HI 2013, ‘*Pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan*’. *Jurnal analisis akuntansi*, vol.2, no.1 Meret 2013.
- Rizkiningsih, Priyesta. 2012. “*Faktor – faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR): Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara - negara gulf cooperation council*”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tiswiyanti, W, Dewi F, dan Wiralestari 2012, ‘*Analisis pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba*’. *Jurnal penelitian*. vol.14, no.1 Januari-Juni 2012, hlm.61-66.
- Wahyuni, sri.2018. “*Islamic Social Reporting Disclosure and Determinant Factors: Empirical Evidence from Islamic Banks in Indonesia*” : Atlantis Press